

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Pertanian Pada Gapoktan Nirwana Di Kelurahan Detusoko Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende, maka digambarkan implementasi atau pelaksanaan Program Pemberdayaan Pertanian Pada Gapoktan Nirwana. Ada beberapa indikator yang akan dikaji dalam menggambarkan implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Pertanian Pada Kelompok Tani yang tergabung dalam Gapoktan Nirwana yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

5.1. Implementasi Program Pemberdayaan Pertanian pada Gapoktan Nirwana di Kelurahan Detusoko Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende

Implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Pertanian adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Program pemberdayaan pertanian yang ada pada Gapoktan Nirwana diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat. Gapoktan Nirwana memiliki kegiatan-kegiatan seperti: memanen padi, memacul kebun, menyiangi rumput, arisan dan amal, semuanya dilakukan secara bersama.

Untuk melihat kembali kejelasan tujuan program, penulis secara mendalam akan melihat kembali soal implementasi program ini apakah tepat sasaran dan sesuai dengan hasil yang diinginkan dengan menggunakan model implementasi George C. Edward III.

5.1.1.Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting dalam upaya memberikan pemahaman tentang sesuatu kepada orang lain. Melalui komunikasi memungkinkan adanya persamaan persepsi tentang sesuatu hal atau obyek tertentu. Oleh karena itu, komunikasi menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kesamaan persepsi dan cara pandang.

Komunikasi merupakan salah satu indikator penting yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Proses implementasi kebijakan akan efektif, jika para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Dalam penelitian ini, 2 aspek yang digunakan untuk mengukur keberhasilan komunikasi adalah transmisi (penyaluran informasi) dan kejelasan tentang program

a) Kejelasan Tentang Program

Keberhasilan suatu program juga sangat ditentukan oleh jelas tidaknya program tersebut. Kejelasan suatu program dapat dilihat dan dikaji melalui regulasi yang mengatur program tersebut serta pemahaman dari setiap unit pelaksana dan yang terutama adalah

pemahaman dari masyarakat itu sendiri yang menjadi sasaran atau target dari program tersebut.

Program Pemberdayaan Pertanian sebagai sebuah program tentunya memiliki regulasi dan pedoman yang mengaturnya yang terdapat pada UU NO 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian. Regulasi dari program Pemberdayaan Pertanian tentu juga memuat berbagai ketentuan yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat dalam program Pemberdayaan Kelompok Tani. Ketentuan yang telah diatur tersebut haruslah dilaksanakan dengan baik sebagai bagian dan upaya dalam menjalankan program Pemberdayaan Kelompok Tani.

Kejelasan tentang program juga perlu didukung dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan Nirwana. Secara tidak langsung, kegiatan yang rutin dilakukan akan mendukung kejelasan pelaksanaan program.

Tabel 5.1.a Kegiatan Gapoktan Nirwana Tahun 2018

Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Kegiatan budidaya meliputi cara mengolah lahan, takaran pemberian dosis terhadap tanaman, cara menanam berbaris, cara panen dll	Setiap bulan
Kegiatan ekonomi pemupukan modal	Setiap bulan

Sumber: Data Penyuluh, 2018

Berkaitan dengan hal ini, disampaikan oleh Kepala BPP Bapak Welly Lele yang mengatakan bahwa:

“Ada dua versi programnya itu, ada yang berasal dari pemerintah dan ada juga yang berasal dari kelompok tani itu sendiri. Kalau yang dari pemerintah itu yang langsung dari atas ke bawah, sedangkan yang dari masyarakat tani itu timbul dari bawah, melalui musrembang baru kita jalankan program apa yang seharusnya kita jalankan. Contohnya pertanian. Kalau untuk pertanian pereka (kelompok tani) mengusulkan sesuatu tinggal kita padukan dengan program yang berasal dari pemerintah, jadi kami yang membuat penyuluhan. Seperti itu. Mengenai anggaran pada gapoktan ini, anggarannya berasal dari swadaya anggota kelompok sendiri. Soal prosedur tentu saja harus ada. Apa yang menjadi program dari pemerintah harus dipadukan dengan apa yang terjadi di lapangan agar program itu berjalan dengan baik, itu juga merupakan prosedurnya nona”. (wawancara, 21 juli 2019)

Menyambung yang dikatakan oleh Ketua BPP, Ketua KelompokTani PIN ibuYuliana Sita juga mengatakan bahwa:

“Sebagai ketua kelompok tani saya mengetahui dengan jelas mengenai program ini. Program pemberdayaan ini merupakan program yang berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten Ende yang dilaksanakan untuk membantu kami dalam meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan kami ade. Tim PPL sering melakukan penyuluhan terkait cara memilih bibit unggul, cara mengelolah tanah, penyiangan, cara membuat pupuk, cara memanen dll, kalau bisa mengikuti dengan baik apa yang disampaikan penyuluh”. Terkadang kalau mereka kasih penyuluhan menggunakan istilah baru tu saya rasa kurang mengerti, maklum saja, keterbatasan pendidikan (wawancara 17 Juli 2019).

Berkaitan dengan kejelasan tentang program pemberdayaan pertanian ini juga disampaikan oleh anggota kelompok tani Pin ibu Kristina Ida yang mengatakan bahwa:

“Sudah mengetahui dengan jelas karena selain di sampaikan oleh tim PPL, ketua kelompok tani kami juga akan menyampaikannya kembali. Program ini merupakan program Dinas Pertanian Kabupaten Ende dan dilaksanakan oleh tim penyuluh yang ada di kelurahan ini. Kalau soal prosedur sebagai anggota saya kurang

paham yah, itu yang lebih taunya ketua kelompok saja. Mengenai anggaran, kami mendapatkan dana hibah atau dana PUAP dari pemerintah Kabupaten Ende” (wawancara 17 juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait kejelasan program sejauh ini kurang lebihnya berjalan baik. Dalam hal ini, terlihat bahwa, program itu semakin jelas dikarenakan model perumusan programnya botto-up dimana kelompok sasaran juga dilibatkan dalam perumusan program/ kegiatan sehingga mereka paham dan terlibat dalam pelaksanaan program. Hal ini tentunya akan membantu memperlancar program tersebut dikarenakan adanya pemahaman yang cukup baik dari ketua kelompok tani masing masing.

b) Sosialisasi Program

Transmisi atau penyaluran informasi tentang substansi pelaksanaan penyelenggaraan sebuah program haruslah jelas. Kejelasan ini harus termanifestasi lewat peraturan pelaksanaan program yang mudah dimengerti oleh masyarakat kecil. Sumber informasi utama haruslah mengerti dengan program, yang mana informasi tersebut akan diadopsi oleh masyarakat pelaksana program.

Proses penyaluran informasi program Pemberdayaan Kelompok Tani dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi tentang program. Berkaitan dengan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan program Pemberdayaan Kelompok Tani pada Kelompok Tani Nirwana selama ini

sudah berjalan dengan baik. Realita ini terungkap lewat wawancara dengan bapak Kanisius Pati selaku Ketua Kelompok Tani Muda Mudi. Pada saat wawancara, beliau menjelaskan bahwa:

“Penyuluh pernah datang untuk mensosialisaikan tentang cara merawat padi, pemupukan, pemberantasan hama dll. Kalau bicara soal pemahaman kami paham nona, hanya saja untuk melaksanakan ini kami rasa agak sulit. Maunya, mereka damping kami sampai lapangan. Biasanya yang terlibat itu tim PPL dan kami sebagai ketua kelompok. Mereka (penyuluh) menjelaskan secara jelas dan mengulangi jika kami keliru. Wajibnya sosialisasi dilakukan tiap bulan sekali, tapi jika kelompok tani membutuhkan maka tim PPL akan datang untuk melakukan sosialisasi” (wawancara, 17 juli 2019)

Terkait dengan adanya sosialisasi, disampaikan juga oleh bapak ketua kelompok tani Lowonapu Dominikus Dala, beliau mengatakan bahwa

“kalau soal sosialisasi sering dilakukan oleh penyuluh. Dan itu sangat kami perlukan dalam pengembangan kelompok tani kami. Saya rasa materi sosilasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kalau ada program baru begitu, biasanya ada sosialisasi lagi ade” (wawancara 17 Juli 2019)

Menyambung apa yang dikatakan oleh bapak Kanisius Pati, hal yang lain juga disampaikan oleh bapak Aji selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, beliau mengatakan bahwa:

“Begini ibu, kalau menyangkut program selaludiperlukan yang namanya sosialisai, kalau istilah kami CPCL (calon peserta calon lokasi) pesertanya harus ditemui dulu. Fokus dan lokusnya juga harus jelas karena itu merupakan langkah awal dari SOP, kalau tidak dilakukan itu maka dinas yang akan disalahkan. Sosialisasi ini biasanya dihadiri oleh kepala desa, tua adat, tim PPL, dan ketua gapoktan”(wawancara 23 juli 2019).

Diperjelaskan juga oleh Ibu Yustina Niba sebagai penyuluh yang menerangkan bahwa:

“Sosialisasi pada gapoktan nirwana dilakukan satu kali setiap bulannya. Ada dua sosialisasi yang kami sebagai tim PPL maksudkan disini sosialisasi program baru , jika ada program baru maka kami harus melakukan sosialisasi terkait program tersebut. conthnya sekarang program dari gubernur soal penanaman kelor, jadi kami harus memberikan sosialisasi terkait program tersebut karena itu program baru yang belum dimengerti para petani. Kalau soal sosialisasi tentang persiapan lahan dan lain lain itu sring kami sebut dengan yang namanya pertemuan itu biasanya 1 atau 2 minggu sekali, adapun tambahan pertemuan disaat kelompok tani yang bersangkutan mengalami kesulitan dilapangan. Jika kelompok tani yang bersangkutan membutuhkan kehadiran kami maka salah satu diantara mreka akan menelpon kami dan kami akan mengatur jadwal untuk bertemu. Berkaitan dengan kendala yang sering kami hadapi paling kurangnya fasilitas motor untuk kami PPL. Motor yang ada saat ini hanya 1 saja dan biasanya kami pake ojek atau sistem gonceng tiga orang sudah ade. lalu untuk jaraknya juga cukup jauh” (wawancara 21 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan sosialisasi program sudah dilakukan dengan optimal. Menurut analisis peneliti hal ini dibuktikan karena adanya pemahaman dari kelompok tani. Hal lainnya, karena adanya kesediaan dari tim PPL dalam memberikan sosialisasi tambahan (diluar waktu sosialisasi) jika dibutuhkan.

5.1.2. Sumber Daya

Sumber daya yang memadai dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai

implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomi sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedangkan secara teknologis, sumber daya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan adalah Fasilitas dan Dana.

a) Dana/Insentif

Dukungan Dana atau finansial juga merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya pendukung pelaksanaan program. Dukungan dana yang juga memadai akan mendorong pelaksanaan program agar mencapai target dengan optimal. Ketersediaan dana akan mempengaruhi pelaksanaan program. Apabila dana memadai maka segala keperluan dalam pelaksanaan program dapat dikondisikan dengan optimal dan begitu juga apabila dana yang disediakan tidak memadai maka pelaksanaan program tidak optimal.

Program Pemberdayaan Kelompok Tani juga memerlukan dukungan dana yang memadai. Dana yang ada digunakan dalam mendukung berbagai keperluan pelaksanaan program agar berjalan dengan optimal. Pada tahun 2011 telah digulirkan dana sebesar

Rp.100.000.000 untuk pelaksanaan program dan pada tahun 2018 tetap menggunakan dana yang sama. Berkaitan dengan ketersediaan dana, disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM bapak Aji, bahwa:

“soal dana di tahun 2018 telah digulirkan dari tahun 2011 ade,ditahun 2011 gapoktan niirwana mendapatkan dana puap sebesar 100 juta. 50 jutanya disalurkan ke setiap kelompok tani dengan rinciannya sbb pokja samarasa 10 juta, pokja IKW 5 juta, pokja lowonapu 5 juta, pokja muda mudi 10 juta, pokja baru mekar 10 juta, pokja sama fonga 5 juta, pokja pin 5 juta jumlahnya tergantung kesepakatan bersama. Yang 50 jutanya lagi dialokasikan untuk pengembangan usaha usaha yang ada seperti di bidang peternakan untuk penggemukan sapi dan babi, jual beli hasil pemasaran dan bidang holticuktura pengembangan budidaya sayuran (cabe keriting, tomat, terung dan sayuran lainnya) kalau terkait dana bagi penyuluh digaji oleh pemerintah menggunakan uang Negara, kalau soal insentif itu didapatkan apabila ada kegiatan di desa atau di kelompok tani yang melibatkan penyuluh. Pemberian gaji sesuai golongan masing masing,menyangkut puas dan tidaknya sudah pasti mereka puas karena ada insentif kan” (wawancara 23 juli 2019)

Hal ini juga dipertegas lagi oleh pernyataan Ibu Yustina Niba selaku penyuluh yang menerangkan bahwa

“berkaitan dengan dana ada terus sampe sekarang dan modal yang di kasih pemerintah untuk simpan pinjam dan bergulir di anggota kelompok sendiri melalui gapoktan dan modal itu sudah bertambah yang diambil dari bunga 1%, sekarang sudah sekitar 75 juta. Kemudian 1% tersebut juga masih dibagi setengahnya untuk uang rokok pengurus dan setengahnya lagi digulirkan kepada anggota dan itu sudah kesepakatan besama”(wawancara 21 Juli 2019)

Menyambung apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Ima selaku PPL, mengatakan bahwa

“ade, kalau soal gaji tiap bulannya kami pasti terima karena kami ini PNS. Pemberian gaji juga berdasarkan golongan kami. Mengenai insentif ini kan menyangkut uang tambahan, itu berasal dari pemerintah desa atau kelompok tani yang minta kami melakukan sosialisasi. Insentifnya itu diberikan juga kalau ada ade tapi kalau tidak ada kami juga tidak memaksa”(wawancara 18 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan terkait insentif/dana sudah berjalan dengan baik. Menurut analisis peneliti bahwa dengan pemberian insentif sesuai golongan maka akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi para penyuluh, agar tidak ada yang merasa dianak tirikan. Namun disisi lain, tidak adanya dana pada tahun 2018 tidak mempengaruhi aktivitas kelompok tani, yang merasa lebih membutuhkan pupuk .

b) Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu unsur dalam dukungan sumber daya yang tersedia sebagai pendukung pelaksanaan program. Fasilitas yang ada secara tidak langsung akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dengan adanya fasilitas yang memadai maka rencana program dapat terlaksana dengan baik. Fasilitas yang diberikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program.

Pemberdayaan Kelompok Tani juga memerlukan fasilitas yang tersedia baik sebagai pelaksana kegiatan maupun sebagai sasaran dari program.fasilitas dalam hal ini untuk penyuluh dan kelompok tani. Sejauh ini terkait dengan fasilitas dalam pelaksanaan Program

Pemberdayaan Kelompok Tani untuk penyuluh disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM bapak Aji yang mengatakan,

“ibu, fasilitas yang diberikan kepada penyuluh itu berupa sepeda motor itu pun hanya satu unit saja, terus kami juga sudah menyiapkan Biaya Operasional Prosedurnya (BOP) mereka (penyuluh). Oh, tentu fasilitasnya sudah sangat mendukung PPL kami dalam menjalankan tugasnya. Saya rasa pengadaan fasilitas ini perlu diperbaiki, misalnya motor ditambahkan “(wawancara 23 juli 2019).

Berkaitan dengan hal di atas juga disampaikan oleh ibu Ima Dheno PPL mengatakan bahwa:

“ade kalau omong tentang fasilitas itu menurut saya masih kurang ee. Maksudnya saya disini, dinas hanya memberikan satu unit sepeda motor, sedangkan penyuluh disini ada 3 orang. yah meskipun kami penyuluh tiga orang tapi kan kami dapat kelompok tani yang beda-beda. Nah kalau fasilitas seperti transportasi ini kurang maka kami akan merasa sedikit kesulitan. Karena jarak dari rumah ke kantor dan rumah ke lapangan itu cukup jauh, untuk saat ini hanya transportasi yang kami butuhkan”(wawancara, 18 Juli 2019).

Menyambung apa yang dikatakan oleh ibu Ima Dheno selaku PPL, juga disampaikan oleh penyuluh lainnya ibu Yustina Niba yang mengatakan bahwa

“penyuluh membutuhkan tambahan fasilitas berupa sepeda motor paling tidak dua unit. Kan ada tiga penyuluh termasuk kepala bpp. Na kepala bpp sudah mendapatkan fasilitasnya yaitu satu buah sepeda motor sedangkan penyuluh ada tiga berarti butuh tambahan dua. Kepala BPP menangani 141 kelompok tani se kecamatan detusoko, ibu Ima Dheno menangani 15 kelompok tani di kelurahan detusoko, sedangkan saya sendiri menangani 20 kelompok tani di desa Detusoko barat. Untuk sekarang kami memang agak

kewalahan kami tidak difasilitasi sepeda motor. Jadi kami hanya mengandalkan ojek. Belum lagi kalau jaraknya jauh berarti uang yang kami keluarkan juga lumayan. Sekalipun ada ojek juga kami masih mengalami kesulitan soalnya cukup banyak kelompok tani yang masing masing kami tangani . kalau kami difasilitasi sepeda motorkan paling tidak uang yang kami gunakan hanya untuk isi bensin dan kami juga akan mudah mendatangi kelompok tani yang membutuhkan sosialisasi tambahan.(wawancara 21 Juli 2019)

Fasilitas untuk penyuluh dalam hal ini sepeda motor untuk mempermudah aktivitas penyuluhan dirasa masih kurang, karena hanya terdapat 1 sepeda motor untuk 3 penyuluh. Tentunya hal ini tidak efektif dalam menjangkau kelompok tani. Terkadang juga penyuluh harus menggunakan jasa transportasi lainnya seperti ojek dalam menjalankan tugas.

Selain fasilitas untuk penyuluh yang masih kurang, juga fasilitas bagi kelompok tani belum mencukupi. Dengan jumlah luas lahan yang ada tentunya membutuhkan fasilitas yang memadai seperti handtractor, mesin rontok dan mesin potong rumput

Tabel. 5.1 b Luas Lahan Kelompok Tani

Nama Kelompok Tani	Luas Lahan
Samarasa	23.25 ha
Ikw	10.75 ha
Sama Fonga	13 ha
Pin	15 ha
Baru Mekar	12 ha
Lowonapu	13.5 ha
Muda mudi	12.5 ha
Total	100 ha

Sumber : data penyuluh 2018

Hal ini disampaikan oleh ketua kelompok tani samarasa bapak Hironimus Seko saat diwawancarai, beliau mengatakan:

“Setau bapak fasilitas dari dinas untuk kelompok itu hanya berupa pupuk dan handtraktor. Kalau soal pupuk dan handtraktor ni sudah pasti sesuai dengan kebutuhan kami ade, hanya saja ada fasilitas lain yang kami harapkan selain pupuk ade. Misalnya mesin rontok biar bisa membantu kami dalam menghemat waktu dan tenaga.”(wawancara 17 juli 2019).

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota kelompok tani sama rasa bapak Agus Reku, beliau mengatakan

“kalau bahas soal fasilitas, kami diberikan pupuk dan handtraktor oleh Dinas Pertanian. Soal fasilitas berupa alat bantu mesin rontok itu tidak ada. Kalaupun ada itu kami beli pakai uang kelompok kami sendiri”(wawancara 17 juli 2019).

Terkait fasilitas bagi kelompok tani, juga disampaikan oleh Ibu Ima Dheno selaku PPL yang mengatakan,

“dalam gapoktan nirwana terdapat tujuh kelompok tani dengan luas area pertanian seperti yang ada pada tabel diatas. Ketujuh kelompok tani ini mendapatkan fasilitas yaitu satu unit handtraktor. Kalau mesin rontok itu berasal dari swadaya kelompok tani sendiri. Dengan adanya handtraktor dan mesin rontok tentunya sangat membantu menghemat waktu dan biaya. Karna sebelumnya memanfaatkan tenaga kerja dengan biaya yang cukup mahal. Kalau mengenai soal produktivitas tentunya ada peningkatan hasil panen nona sperti yang sudah kami terterakan di tabel hasil panen padi.(Wawancara 18 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat dengan jelas bahwa terkait fasilitas belum dilakukan secara optimal. Menurut analisis peneliti bahwa perlu adanya perbaikan dalam pengadaan fasilitas ini, karena kurangnya fasilitas yang ada dapat mengakibatkan terhambatnya

program ini.

5.1.3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan, maka terdapat beberapa kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala serius.

Ada beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam proses implementasi suatu kebijakan yakni, pengangkatan implementor dan staf pelaksana.

a) Pengangkatan Implementor

Dalam mendukung proses pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelompok Tani khususnya pada Gapoktan Nirwana, terdapat instansi yang diangkat atau ditentukan untuk berpartisipasi. Instansi tersebut adalah Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Kemudian juga terlibat penyuluh dibawah Dinas Kabupaten yang melaksanakan penyuluhan pada kelompok tani.

Pengangkatan implementor ini diharapkan diangkat secara profesional. Segala bentuk intervensi politik, suku, agama dan keluarga hendaknya dihindari. Pengangkatan birokrasi secara profesional dapat melahirkan orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi, peka terhadap kebutuhan masyarakat/ publik serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Mengenai prosedur penerimaan, penyuluh diterima setelah memasukan surat lamaran di BK3P. Setelah diseleksi dan terpilih maka langsung bekerja sebagai tenaga kontrak penyuluh. Sebelum bekerja penyuluh diberikan tambahan pengetahuan mengenai pertanian dan perternkan. Pembekalan berlangsung slama satu bulan.

Terkait pengangkatan implementor dalam program Pemberdayaan Kelompok Tani, disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM bapak Aji yang mengatakan bahwa:

“ya..penyuluh diangkat sesuai dengan prosedurnya ibu. Dikarenakan keterbatasan dana maka 1 orang penyuluh bisa membina lebih dari satu desa. Pengangkatan penyuluh sudah sesuai dengan prosedurnya ya bu karena tim penyuluh itu harus merupakan orang pertanian yang mengetahui pertanian secara umum”(wawancara 23 juli 2019).

Menyambung yang dikatakan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM, hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala BPP bapak Welly Lele, beliau menyampaikan:

“soal pengangkatannya sudah sesuai prosedur ade, karena penyuluh itu harus tau banyak tentang pertanian. Jadi paling tidak seorang penyuluh harus berasal dari lulusan pertanian. Biasanya sebelum bertugas kami diberikan semacam pengenalan lagi mengenai tugas kami sebagai penyuluh. Kami harus selalu sabar dalam menghadapi kelompok tani yang kami bina. Kalau saya membina 21 gapoktan yaitu 141 kelompok tani, mengenai kunjungan itu saya melakukan kerja sama dengan masing masing kelompok tani untuk beremuk bersama membuat jadwal kunjungan”(wawancara 21 juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini pengangkatan birokrasi sebagai tim penyuluh sudah berjalan cukup optimal. Menurut peneliti dengan adanya pengangkatan birokrasi ini maka ilmu yang didapatkan oleh kelompok tani memuaskan. Namun disisi lain jumlah penyuluh tidak sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah kerja. Tentunya hal ini juga secara tidak langsung akan menghambat optimalisasi kerja penyuluh.

b) Staf Pelaksana

Kesiapan dan kemampuan staf pelaksana sangat menentukan sekali dalam keberhasilan suatu program. Kemampuan yang dimaksud adalah besik (basic) pendidikan dan kemampuan dalam mengurus dan mengelola program yang akan dieksekusikan. Prinsip *the right man on the rihgt place* merupakan prinsip yang penting dalam menempatkan para pegawai atau karyawan dalam bekerja, dimana mereka bekerja sesuai dengan keahlian dan besik (basic) pendidikan yang mereka miliki.

Selain kualitas dari pegawai pelaksana, kuantitas (jumlah) pegawai yang cukup juga sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program. Ketidak cukupan jumlah pegawai berpengaruh bagi efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana program.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kelompok Tani juga membutuhkan keahlian dan pengalaman dari setiap unit pelaksana terlebih khusus dalam hal ini ialah penyuluh. Untuk itu penentuan mulai penyuluh haruslah professional dan mempunyai latar pendidikan yang sesuai.

Tabel 5.1 c Penyuluh Desa Detusoko

Nama Penyuluh	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan
Welly Lele	Kepala BPP	S1 Pertanian
Ima Dhen	Pegawai	D3 Pertanian
Yustina Niba	Pegawai	S1 Pertanian

Sumber Data Kantor BPP Detusoko 2018

Terkait dengan hal ini, disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang mengatakan bahwa:

“ibu, mengenai latar belakang pendidikan penyuluh tentunya sudah sesuai dengan pengangkatannya yah. Karena seorang penyuluh itu harus dan wajib tau soal pertanian , paling tidak pertanian secara umum. Menyangkut system evaluasi yang dilakukan ppl itu dinamakan Evaluasi Kinerja Penyuluh. Itu dilakukan setiap 3, 6, dan 1 tahun sekali. Evaluasi ini membahas perkembangan yang ada pada kelompok tani yang dibina”(wawancara 23 juli 2019).

Berkaitan dengan hal di atas, disampaikan juga oleh ketua kelompok tani sama fonga bapak Kristianus Rada, bahwa:

“yah,,,kalau omong membantu pastinya sudah sangat membantu, karena dengan adanya program ini hasil panen kami meningkat. Berkat adanya penyuluhan juga membuat kami yang semulanya tidak tau apa apa jadi sedikit tau soal pertanian biar sedikit. Mereka (penyuluh) sangat disiplin ilmu karena memang besiknya mereka disitu. Tapi sayangnya jumlah mereka kurang jadi perlu ditambah supaya bisa membimbing kami sampai di lapangan”.(wawancara 17 juli 2019).

Berdasarkan apa yang dilihat di atas maka dapat disimpulkan bahwa terkait pengangkatan birokrasinya sudah tergolong baik, tetapi menurut analisis peneliti perlu diperhatikan lagi mengenai jumlah staff pelaksanaanya kalau bisa ditambah karena kurangnya staaf pelaksana juga bias memicu terhambatnya program.

5.1.4.Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Struktur birokrasi yang berisi kewenangan dan kekuasaan dalam menjalankan sesuatu, meungkinkan adanya legalitas seseorang dalam menjalankan perannya. Keberadaan birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Dengan demikian terdapat satu indikator dari struktur birokrasi yakni prosedur kerja dan ukuran dasarnya (SOP).

a) Prosedur Kerja Dan Ukuran Dasarnya (SOP)

Setiap instansi pemerintah maupun swasta pasti memiliki memiliki Prosedur Kerja atau yang lebih dikenal dengan istilah SOP (Standar Operasional Prosedur). Sebagai suatu instansi atau lembaga, pemerintah yang dalam hal ini sebagai subjek pasti mengeluarkan kebijakan atau regulasi. Regulasi sebagai produk pemerintah tentunya memiliki ukuran dasar dan prosedur kerjanya dalam pelaksanaannya di lapangan. SOP ini diadakan dengan tujuan agar segala proses aktivitas kerja dapat teratur dan berjalan dalam koridor yang tepat. Sehingga apa yang menjadi tujuan (goal) dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Dalam Program Pemberdayaan Kelompok Tani, tentunya terdapat SOP yang harus dilaksanakan oleh setiap unit sebagai bagian dari pelaksanaan program mulai dari Dinas Pertanian sampai dengan kelompok tani yang menjadi sasaran program. Standar Operasional Prosedur hendaknya dilaksanakan dengan baik agar segala ketentuan program dapat dijalankan dengan optimal. Berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur secara umum kegiatan yang dilakukan selama tahun 2018 meliputi kegiatan seperti kegiatan budidaya yang meliputi cara mengolah tanah, cara menggunakan pupuk, cara menanam pakai

baris, cara memilih bibit unggul dan cara panen. Pada dasarnya SOP yang dilaksanakan adalah bagian dari tugas penyuluh diantaranya rutin melakukan pendampingan kepada kelompok tani juga di dalamnya terkait pemecahan masalah yang dihadapi kelompok tani.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM bapak Aji yang mengatakan bahwa:

“ibu, mengenai SOPnya (penyuluh) ada namanya yaitu RKTP (Rancangan Kerja Tahunan Penyuluh). Program kerja semuanya ada didalam RKTP tadi sehingga penyuluh tidak boleh bekerja diluar dari RKTP tadi. SOP nya itu bias saja seperti mendata berapa kali melakukan penyuluhan selama setahun, jadi sebelum dijalankan ke tahun berikutnya sudah harus dibut SOPnya dari 2 bulan sebelumnya. Soal optimal atau tidaknya tergantung dari penyuluh masing masing.(wawancara 23 juli 2019)

Kesempatan yang sama saat diwawancarai disampaikan juga oleh bapak Kepala BPP bapak Welly Lele menyampaikan bahwa:

“nona, tentu saja kami memahami dengan baik karena kami ini tim penyuluh, maka kami juga harus terlibat dalam proses perumusannya sampai pada tahap evaluasinya. Tiap bulannya juga kami selalu turun ke Ende untuk melaporkan hasil kegiatan. Kalau terkait pemecahan masalah Kendala yang didapatkan di lapangan ambil contoh tahun 2018 masalah padi sawah masalahnya yang kita harapkan kelompok\tani mengerti cara pembudidayaan tu 100% tapi tau taunya hanya 50% yang mengerti dengan baik. Contohnya kita sudah kasihtau dosis yang pas untuk menggunakan pupuk, saat ada kita mereka tau tapi saat kita sudah pulang mereka buat yang lain. Menegrti sja karena disini kami sebagai tim PPL mendidik orang dewasa e ade beda dengan mendidik anak kecil jadi agak susah.Kalau soal cara mengatasi tiap kali ada pertemuan hal yang sama selalu kami sampaikan secara terus menerus.”(wawancara 21 juli 2019).

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh ketua kelompok tani

Baru Mekar bapak Stefanus Seni, beliau mengatakan bahwa:

“kalau saya secara pribadi kurang memahami terkait perumusannya hingga tahap evaluasinya karena saya tidak terlibat langsung saat itu. Penyampaian prosedurnya agak sulit yah nona mengerti saja karena SDM ,terkadang saya susah memahami istilah baru dari penyuluh”(wawancara 17 juli 2019).

Hal lain juga disampaikan oleh anggota kelompok tani Baru

Mekar ibu Rosalia Bara, mengatakan bahwa

“sudah sangat membantu nona, selain ada peningkatan hasil panen dengan adanya program pertanian ini dapat membantu memenuhi kebutuhan kami meskipun sedikit. Karena kami sekarang ada buat arisan per bulannya Rp 100.000 jadi paling tidak bisa membantu memenuhi kebutuhan kami. Menurut saya program ini baik, hanya saja tolong diperhatikan kembali menyangkut fasilitas yang kami butuhkan. Pada kelompok tani kami ini tidak mengalami penambahan anggota, hanya ada pengurangan itupun hanya satu orang saja. Kami tidak memaksakan kehendak dari anggota, jika mereka mau jadi anggota silahkan, kalau mau keluar juga silahkan, tergantung kemauan mereka sendiri”(wawancara 17 juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sejauh ini terkait prosedur kerja dan ukuran dasarnya sudah berjalan optimal, karena dikerjakan berdasarkan panduan yang ada yakni RKTP. Mengenai perumusan program sebaiknya ketujuh ketua kelompok tani juga ikut dilibatkan agar mereka tau secara jelas program yang akan dijalankan. Soal fasilitas belum berjalan dengan baik, hal ini akan berpengaruh pada jalannya program ini.

5.2.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Pemberdayaan

Kelompok Tani

Sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Kelompok Tani, sebagai upaya dalam memberdayakan para petani menuju ke arah yang lebih baik dalam pengolahan pertanian, juga terdapat hal-hal yang mendukung serta menghambat implementasi program Pemberdayaan Masyarakat.

5.2.1.Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program

a) Kesiapan Penyuluh Untuk Melakukan Penyuluhan Di Luar Jam Kerja

Hal ini termasuk dalam salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan program karena di dukung dengan adanya pemahaman yang cukup baik dari masing masing ketua kelompok tani, ada juga alasan lain mengapa sosialisasi program tergolong optimal karena adanya kesiapan dari pihak penyuluh untuk memberikan sosialisasi tambahan (diluar sosialisasi wajibnya) jika dibutuhkan

b) Penghargaan Yang Seimbang Bagi Implementor

Mengenai insentif dikatakan juga tergolong optimal, hal ini desabkan karena pemberian gaji itu berdasarkan golongan. Jadi ada kepuasan tersendiri bagi para penyuluh.

c) Keterlibatan Aktif Penyuluh Dan Kelompok Sasaran

Aktifnya penyuluh dan kelompok sasaran sangat mendukung pelaksanaan program ini. Tentunya dengan aktifnya komponen utama

tersebut maka dapat dipastikan bahwa program pemberdayaan kelompok tani berjalan optimal. Disisi lain, Prosedur kerja dan ukuran dasarnya merupakan faktor keberhasilan karena dikerjakan berdasarkan panduan yang ada yakni RKTP. Mengenai perumusan program sebaiknya ketua kelompok tani juga ikut dilibatkan agar mereka tau secara jelas program yang akan dijalankan. Soal fasilitas belum berjalan dengan baik, hal ini akan berpengaruh pada jalannya program ini.

5.2.2.Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Program

a) Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat bagi pelaksanaan program. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Seperti yang kita semua ketahui bersama bahwa fasilitas itu sebenarnya merupakan faktor yang amat sangat penting dikarenakan tanpa adanya kelengkapan fasilitas maka akan mengurangi semangat kerja dari kelompok atau tim penyuluh. Hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan program

b) Kurangnya Jumlah Penyuluh

Kurangnya jumlah penyuluh secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja penyuluh dikarenakan harus melayani lebih dari 1 desa dengan jumlah gapoktan yang banyak serta jauhnya antar desa yang harus ditempuh.